



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



RENCANA KERJA (RENJA)

*DINAS
PERKEBUNAN*

2025

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



KABUPATEN MUSI BANYUASIN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERKEBUNAN

Jalan Perjuangan Lingkungan VII No. 314 Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon: (0714) 321168 SEKAYU
Faksimile : disbun.mubakab@gmail.com Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : B-900/234/KPTS/ DISBUN/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor ; B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sebagai Tindaklanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
 - Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
16. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

17. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor ; B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD) Sebagai Tindaklanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 525/020/KPTS/DISBUN/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimanatercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secarapenuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001

Lampiran I.
Nomor : B-900/ 234/KPTS/Disbun/2025
Tanggal : 11 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- 1. Pengarah : KEPALA DINAS PERKEBUNAN
- 2. Penanggungjawab : SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN
- 3. Ketua : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
- 4. Sekretaris : PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 5. Anggota :
 - 1. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA
 - 2. KEPALA BIDANG PRODUKSI
 - 3. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
 - 4. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA DAN PENYULUHAN
 - 5. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) SEKAYU
 - 6. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) LAIS
 - 7. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) BABAT TOMAN
 - 8. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) BAYUNG LENCIR
 - 9. ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 10. ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
- 6. KESEKRETARIATAN : PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001

Lampiran II.

Nomor : B-900/ /KPTS/Disbun/2025
Tanggal : 11 Maret 202
**Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025**

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Pengarah, yaitu :

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025;
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) 2025.

2. Penanggung Jawab :

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan;
- b. Membantu dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan;
- b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaantim penyusun kepada penanggungjawab Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Perkebunan.

4. Anggota

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA, tahun lalu;
- b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Perkebunan;
- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Dinas Perkebunan;
- d. Melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD;
- e. Merumuskantujuan, sasaran dan program kegiatan;
- f. Merumuskan kegiatan prioritas.


KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001

Lampiran III.
Nomor : B-900/ /KPTS/Disbun/2025
Tanggal : 11 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

AGENDA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA - PD

No.	Tahapan	Jadwal				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja					
2.	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja dengan Bidang Mitra Bappeda					
3.	Input hasil verifikasi Renja ke SIPD-RI					
8.	Review Rancangan Akhir Perubahan Renja oleh APIP					
9.	Penetapan Perubahan Renja					



KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Perjuangan Lingkungan VII No. 314 Telp. (0714) 321168 SEKAYU (30711)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : / /KPTS/DISBUN/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Meninmbang

- Menimbang** : a. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B. 050/137/SETDA/BAPPEDA/2025 Tanggal 29 Desember 2023 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- b. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor ; B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD) Sebagai Tindaklanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk mencapai target yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam Tahun 2025;
- d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1913);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 525/020/KPTS/DISBUN/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**
- KESATU : Memberlakukan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Juni 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya sehingga selesai penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dan Pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan. Adapun penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan tema pembangunan yang harus dijadikan acuan oleh Perangkat Daerah yaitu ***“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”***. Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ada 14 Arah Kebijakan, Namun diantara Arah Kebijakan tersebut hanya ada 2 yang terkait dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu : (4) Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kawasan Komoditas Unggulan; dan (6) Penyediaan Fasilitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin tentang Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (TA. 2025). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah

ditetapkan menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Pada TA. 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, semoga rencana ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perkebunan yang berkelanjutan.

Sekayu, Juli 2025
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AKHMAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan serta Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	55
3.3 Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah.....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
.....	71
BAB V PENUTUP.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah sesuai dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Perkebunan dengan Renstra Dinas Perkebunan.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Perkebunan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Renja Dinas Perkebunan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan.

Perubahan Renja Dinas Perkebunan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

1.1.1. Pengertian Perubahan Renja

Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Proses Perubahan Renja ini karena adanya penambahan dana anggaran salah satu pergeseran di dalam Sub Kegiatan dalam Program dan Kegiatan di Dinas Perkebunan.

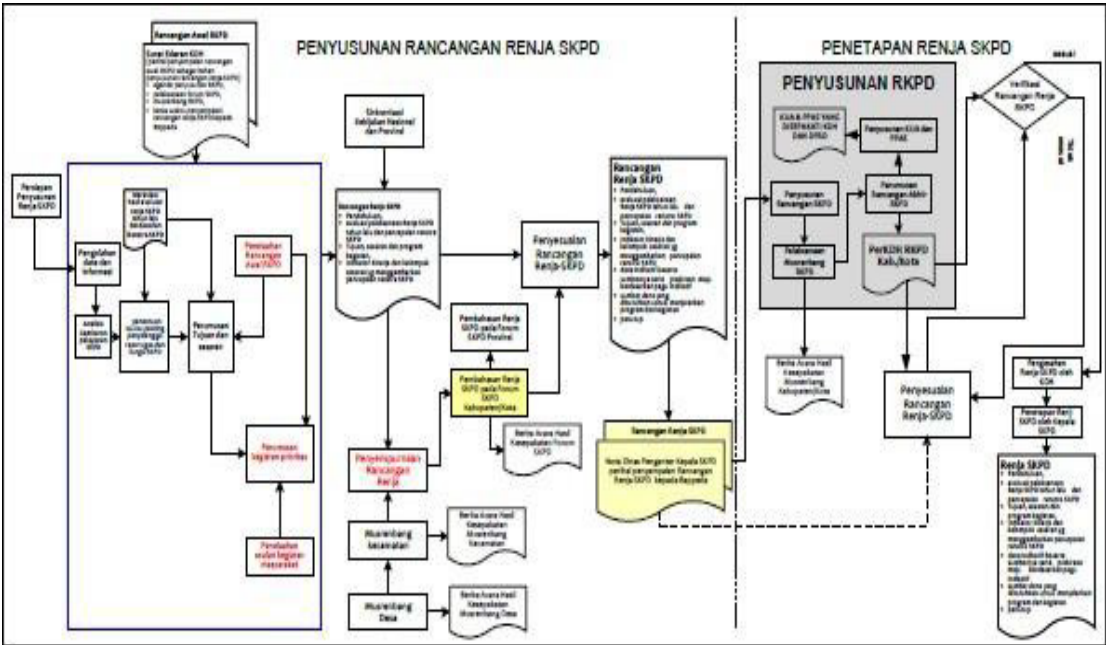
1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perubahan dari materi Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah

memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

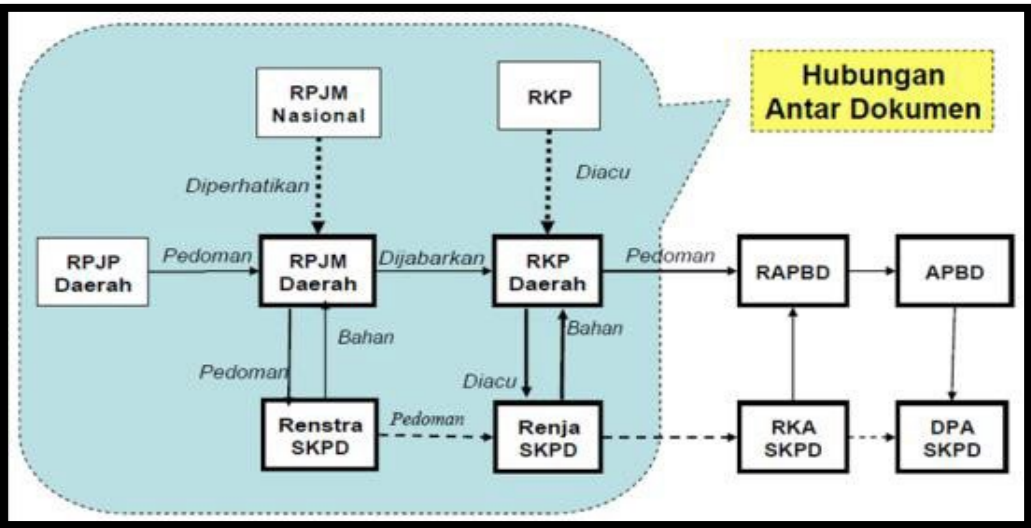


Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja
 - ✓ Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja
 - ✓ Orientasi mengenai Perubahan Renja
 - ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - ✓ Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Perumusan Rancangan Perubahan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;



Gambar 1.3. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 287 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
15. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/137/SETDA/2023 Tahun 2023 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
16. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor ; B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD) Sebagai Tindaklanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 525/020/KPTS/DISBUN/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

1.3.1. Maksud dibuatnya Perubahan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.2. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Perkebunan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perkebunan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan perkiraan capaian Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

Lampiran tabel usulan program dan kegiatan dari kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2025.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Penjelasan mengenai rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perkebunan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbun Tahun 2024 dan pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Triwulan I sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan perkebunan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 triwulan I terdapat ***perubahan*** karena adanya pengurangan kegiatan Sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian kegiatannya. Hal ini disebabkan karena sasaran dan prioritas yang hendak diwujudkan sesuai dokumen rencana strategis periode 2023 - 2026. Namun demikian, core business Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai organisasi perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi penambahan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pelaksanaan Renja Tahun 2025 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I, sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 dibawah ini:

**Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
Sampai Dengan Triwulan I (di permendagri 86 tahun 2017 di form E.81)**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/ Subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan subkegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
								Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4		5	6	7 = 6/5	8	9 = (6+8)	10 = 9/4 x 100
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	01		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kabupaten	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ntp Kabupaten Tersedianya data dan statistik perkebunan	4 Dokum en	Dokum en	1	1	100	1	2	50%
3					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	01		2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Sangat Tepat	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	01	2.01		Perencanaann, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan Peencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	6	6	100	8	14	87%
3	27	01	2.01	06	Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD	Tersedianya Dokumen RENJA dan TAPKIN	16	Dokumen	4	3	100	4	7	44 %

3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	3.360	Orang	770 Orang/tahun	630 orang/tahun	81 %	742 orang/tahun	1372 orang	41 %
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	6	6	100	6	6	100 %
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	1	1	100	1	2	50 %
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya ASN yang mengikuti Diklatpim	20	Orang	2	-	100	2	2	10 %

3	27	01	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	-	-	-	5	5	25 %
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	4	Paket	1	1	100	1	2	50%
3	27	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	Paket	6	6	100	5	10	125 %
3	27	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang Tersedia	4	Paket	4	4	100	1	5	125 %
3	27	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	8	Paket	1	1	100	1	2	25 %
3	27	01	2.06	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	4	Paket	2	2	100	2	4	100 %
3	27	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Nasional dan Lokal	16	Dokumen	4	4	100	4	8	50 %

3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	48	laporan	12	12	100	12	24	50 %
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diikuti Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kabupaten musu banyuasin yang diikuti	48	laporan	12	12	100	12	24	50%
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	Unit	0	0	0	0	0	0 %

3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	22	Unit	0	0	0	11	11	50 %
3	27	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Tersedianya Meubeler Kantor	4	Paket	2	2	100	1	3	75 %
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	0	0	0	0		0 %
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	0	0	0	0	0	0 %
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Tercapainya Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12	Laporan	12	12	100	12	24	50 %
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan honor bulanan selama 12 bulan untuk tenaga kerja sukarela (TKS)	48	Laporan	12	12	100	12	24	50 %

3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	6	6	100	6	12	50 %
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	1	1	100	1	2	25 %
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranaa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128	Unit	45	45	100	42	87	67 %
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan	1,55	%						

3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tercapainya Pengawasana Penggunaan Sarana Pertanian	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	48	Laporan	12	12	100	15	27	56 %
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	48	Laporan	12	12	100	15	27	56 %
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	12	VUB	3	3	100	3	6	50 %
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	dokumen	0	0	0	0	0	0 %
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4	Dokumen	0	0	0	0	0	0%

3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,55	%							
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)	100 %	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4	Dokumen	1	1	100	1	2	50 %	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian (Perkebunan)	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	12	Unit	0	0	0	0	0	0 %	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	12	Unit	0	0	0	2	2	16 %	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jaringan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	20	Unit	17	17	100	41	58	483 %	

3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	12	Unit	0	0	0	0	0	0	0 %
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana Pengendalian bencana	1,55	%							
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota	100	%							
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	200	Hektar	50	50	100	25	75		37 %
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	3.658.408	Hektar	914602	914602	100	914602	1.829.204		50 %

3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Data Non OPT, Peta Daerah Rawan Kebakaram dan Lokasi Sumur Bor dan Embung	60	Laporan	15	15	100	15	30	50 %
3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase lahan perkebunan yang bersertifikat	2,15	%						
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten/kota	100 %	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	48	Laporan	12	12	100	12	24	50 %

3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	2,56	%						
3	27	07	2.01		Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Pelaksana Penyuluhan Pertanian	100	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	60	Unit	0	0	0	0	0	0
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	60	Unit	6	6	100	15	21	35%
3	27	07	2.01	03	Pennyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	78	unit	20	20	100	24	44	56 %
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	16	Unit	4	4	100	3	7	44 %

Dari Hasil analisis Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024, Tabel T-C.29 diatas sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, dapat dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

1. Sebagian besar dari seluruh subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan telah memenuhi target kinerja.
2. Terdapat beberapa subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang disebabkan beberapa hal yaitu, subkegiatan tersebut tidak didanai pada tahun 2023 dan 2024, tidak adanya SDM yang akan melaksanakannya seperti subkegiatan Pendidikan dan pelatihan, tidak adanya penyelenggara bimtek yang mengusung materi bimtek sesuai kebutuhan dinas, dan tidak adanya pendelegasian tugas perbantuan dari pemerintah pusat dan adanya kendala teknis lainnya baik internal maupun eksternal yang diluar kendalai Dinas Perkebunan;
3. Terdapat sebagian kecil subkegiatan yang realisasi nya melebihi dari target yang telah ditentukan terutama pada subkegiatan yang bersifat kontruksi fisik. Hal tersebut disebabkan banyaknya aspirasi masyarakat serta dukungan dana dari pemerintah daerah.

Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari *outcome* suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (*outcome*) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Berikut adalah tabel pengukuran perbandingan antara target dan realisasi Target Kinerja Tahun 2024 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perkebunan dengan Bupati Musi Banyuasin, selama kurun waktu Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.
Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Perjanjian Kinerja (PK)	Capaian Kinerja terhadap PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	1. Presentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan	2,85	1,40	1,45
Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan	2. Presentase peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	2,8	2,75	0,05

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 1,50 %. Jika dilihat masing-masing dari ke 2 (dua) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan***, di dukung oleh 2 indikator yaitu :
 1. Presentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas startegi perkebunan mencapai target kinerja sebesar 2,85%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa terdapat faktor produksi primer yang perannya masih kurang dalam menunjang produktivitas komoditas strategis ketersediaan bibit unggul komoditas strategis khususnya bibit karet yaitu sumber daya alam (benih) dan tenaga kerja, serta intensitas serangan OPT perkebunan yang cukup signifikan disebabkan oleh rendahnya partisipasi pekebun dalam mengendalikan serangan OPT karena minimnya

pengetahuan pekebun tentang OPT dan cara pengendaliannya selain juga faktor ekonomi sehingga pekebun sangat jarang melakukan pengendalian terhadap serangan OPT di kebun mereka. Selain itu juga sangat minimnya pendanaan APBD maupun APBN dalam membantu pekebun untuk menekan jumlah serangan OPT. Selain faktor produksi primer terdapat juga pengaruh faktor produksi sekunder yaitu dana (modal).

2. Untuk sasaran ***Meningkatnya Kesejahteraan petani Perkebunan***, di dukung oleh indikator yaitu Persentase peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) dengan target sebesar 2,75%, telah tercapai sebesar 2,8% atau melebihi target sebesar 0,05 %. Kondisi tersebut disinyalir dipengaruhi oleh persepsi dalam proses pengukuran indeks harga yang diterima petani (IT), yaitu masih menggunakan nilai produk primer, belum menggunakan nilai produk akhir. Sementara saat ini dominan pelaku usaha tani perkebunan telah mampu memproduksi di atas tahapan produk primer, yang sudah barang tentu memiliki nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi. Disisi lain, adanya kebijakan industri yaitu adanya substitusi oleh barang impor sehingga menyebabkan harga-harga produk industri yang dikonsumsi oleh pelaku usaha tani perkebunan menjadi mahal, atau indeks harga yang dibayar petani (IB) menjadi tinggi. Sementara dalam penentuan NTP-R, perhitungan IB masih berdasarkan pada indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, penambahan barang modal dan biaya produksi.

Berdasarkan Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Triwulan I Tahun 2025, maka perlu didukung kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan rencana kerja dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Mengusulkan penambahan SDM yang kompeten berdasarkan analisis beban kerja.
2. Menyusun rencana aksi sebagai strategi pencapaian target kinerja program/kegiatan.
3. Mengevaluasi secara berkala (Per Triwulan) terhadap rencana aksi yang telah disusun.
4. Melakukan monitoring dan rekomendasi tindakan penyesuaian jika capaian target kinerja program/kegiatan per semester belum tercapai.
5. Mengontrol tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan.
6. Koordinasi antar bidang teknis dalam upaya pencapaian target kinerja program/kegiatan.

Seluruh dasar kebijakan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, selain diimplementasikan kedalam Program/Kegiatan yang difasilitasi oleh sumber anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin juga difasilitasi melalui anggaran APBN Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

1. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cermin dari sistem dan prosedur penugasan: (i) Pemerintah kepada daerah dan atau desa, (ii) dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta (iii) pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Adapun pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut dijabarkan kedalam Program/Kegiatan sebagai berikut : Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan indikasi kegiatan meliputi : Peningkatan produksi benih unggul komoditas tanaman perkebunan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Komoditas Tanaman Perkebunan, pengelolaan areal budidaya tanaman perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan komoditas tanaman perkebunan, peningkatan teknologi budidaya komoditas tanaman perkebunan melalui bimtek dan adopsi teknologi, pelayanan pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan; Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perkebunan, Peningkatan Mutu dan fasilitasi sarana penanganan Pasca Panen Produk Perkebunan, Promosi Produk Komoditas Perkebunan; Fasilitasi Prasarana usaha budidaya tanaman perkebunan, penanganan gangguan usaha perkebunan, pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan dan lingkungan

b. Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi ini merupakan dana penunjang dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan judul program yang sama, sedangkan indikasi kegiatannya meliputi : fasilitasi koordinasi, konsultasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan perencanaan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana ini diperuntukan bagi fasilitasi pembangunan/penyediaan sarana-prasarana yang bersifat teknis, seperti pembangunan jalan produksi dan pembangunan irigasi air tanah serta embung.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang begitu luasnya dimana terdiri dari 15 Kecamatan dan 245 Desa / Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perluasan/peremajaan areal tanaman perkebunan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai pelaksana dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing dan religius.

Perkembangan ekonomi mikro melalui peningkatan luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perkebunan dan rata-rata pendapatan petani pekebun serta tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha perkebunan (perusahaan perkebunan) dalam mematuhi kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan strategi yaitu :

1. Peningkatan lahan perkebunan sesuai dengan potensi kearifan lokal, serta meminimumkan luas lahan tidur dan terlantar dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.
3. Peningkatan kualitas SDM petani dan aparatur.
4. Peningkatan daya saing produk unggulan.
5. Pemantapan ekonomi kerakyatan.
6. Pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi melalui upaya penguatan modal, kewirausahaan, membuka akses pasar, kemitraan serta pemberdayaan asosiasi petani.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Target indikator yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel. T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO .	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7		9	12	13	14
1	Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) %	-	IKU	2,35	2,55	2,75	2,95	2,6	2,55	2,75	
2	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	-	IKU	1,55	1,7	1,85	2,1	1,7	1,7	1,85	
3	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pertanian (Perkebunan)	-	IKU	100	100	100	100	95	92	93	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan komperatif dalam pembangunan perkebunan. Apabila dikelola dengan baik keunggulan komperatif ini dapat mendukung keunggulan kompetitif. Masalah lahan dalam pembangunan perkebunan erat kaitannya dengan pemanfaatan, status kepemilikan dan penguasaannya serta aspek pemanfaatan.

Pertambahan jumlah penduduk berimplikasi pada kebutuhan lahan yang pada akhirnya bisa terjadi kompetisi pemanfaatan lahan yang kurang sehat bagi kepentingan multisektor yang akhirnya dapat menjadi pemicu konflik sosial, status kepemilikan lahan menjadi salah satu masalah krusial dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan. Rata-rata petani pekebun tidak memiliki dokumen kepemilikan lahan yang memadai dalam bentuk sertifikat. Hal ini menghambat petani pekebun dalam mengembangkan usaha kebunnya karena kesulitan dalam mengakses dana perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Struktur dan distribusi penguasaan lahan yang tidak seimbang antara PBS dengan masyarakat dapat menjadi permasalahan sosial dan mengganggu ketahanan ekonomi daerah/local.

Potensi lainnya dalam pembangunan perkebunan adalah kondisi agroekosistem. Komponen agroekosistem yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di kabupaten Musi Banyuasin serta keanekaragaman jenis tanah menjadi faktor yang sangat mendukung dan potensial untuk pengembangan perkebunan.

Sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan perkebunan. Penyerapan tenaga kerja disektor perkebunan adalah mempunyai peluang yang besar, hal ini tercermin dari peran sub sektor perkebunan yang sangat dominan pada sektor pertanian. Dengan kata lain sangat besar ketergantungan hidup masyarakat pada sub sektor perkebunan. Melalui pendektan yang tepat, besarnya peran dalam angkatan kerja tersebut, sekaligus juga sebagai potensi pengembangan perkebunan. Tenaga terampil, terlatih dan berdedikasi tinggi perkebun dan apartur perkebunan adalah tuntutan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan.

Budaya kerja baik petani pekebun maupun aparatur sebagai pembina, masih berorientasi pada anggaran pemerintah. Pekebun umumnya selalu mengharapkan bantuan pemerintah, sementara kegiatan dan bimbingan dari petugas umumnya baru dimulai ketika anggaran pemerintah tersedia. Akibatnya pembinaan dan bimbingan berjalan tidak berkeseimbangan sehingga kapasitas pekebun antara lain dalam hal adopsi teknologi, wirausaha, manajemen dan akses informasi masih kurang optimal.

Meskipun telah dibentuknya beberapa asosiasi petani pekebun berdasarkan komoditi, keberadaanya ternyata belum memberikan peran yang maksimal. ketergantungan kelembagaan pekebun ini terhadap pemerintah masih sangat tinggi, sehingga menyebabkan kelembagaan pekebun tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dan optimal untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku agribisnis lainnya.

Berbagai kegiatan pembangunan perkebunan periode sebelumnya telah berhasil meningkatkan mutu dan produktivitas sebagian komoditi perkebunan., Meskipun demikian mutu dan produktivitas tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Beberapa kendala dalam upaya meningkatkan produksi dan mutu perkebunan antara lain kondisi infrastruktur perkebunan yang belum memadai. Kondisi demikian menghambat pekebun dan investor dalam mengembangkan agribisnis perkebunan.

Selain hal tersebut, belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bersertifikat/bermutu, serangan hama penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan, dan tanaman yang sudah tua merupakan masalah lain yang menghambat upaya peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan.

Kebijakan pemerintah terkait dengan kemitraan telah tertuang dalam PERMENTAN Nomor 26 Tahun 2007, pembangunan kebun masyarakat di sekitar perkebunan besar dan juga pelaksanaan Program *Community Development* (CD) oleh perusahaan perkebunan adalah upaya pemerintah dalam pembangunan perkebunan, namun belum berjalan secara optimal sesuai sarannya yang diharapkan yaitu memberikan *education* bagi masyarakat

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sejauh ini Dinas Perkebunan memiliki sumber daya aparatur yang kurang, dimana banyaknya kekosongan formasi jabatan yang disebabkan oleh pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan akibat mutasi. Namun meski demikian, pelayanan dinas tetap dioptimalkan guna tetap menjaga kualitas pelayanan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang terbatas, dinas perkebunan masih bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa akibat kekurangan SDM tersebut dapat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terutama dalam proses pencapaian target kinerja dinas perkebunan. Berikut adalah tabel capaian kinerja dinas perkebunan.

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian										Naik/ Turun
			2022		2023		2024		2025		2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	1. Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
		%	1,40	2,85	1,55	1,4	1,70	1,75	1,95	2,0	2,20		
2. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan	2. Prosentase peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	%	2,75	2,8	2,35	2,4	2,85	2,90	2,90	2,95	2,95		

Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Pelayanan Dinas Perkebunan

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor Perkebunan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang produksi, prasarana dan sarana, kelembagaan dan usaha serta perlindungan perkebunan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis Dinas Perkebunan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian Faktor Eksternal dan Internal dengan menggunakan analisis SWOT pada Gambar 2.1 di bawah ini :

Faktor Internal Faktor Eksternal		Kekuatan Strenght (S)						Kelemahan Weaknesses (W)					
							dst						dst
Peluang Opportunity (O)		S – O						W - O					
	dst												
Tantangan Treath (T)		S – T						W - T					
	Dst												

Faktor Eksternal

1. Tantangan

- Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dalam pengembangan pelayanan untuk menangani 1 (satu) urusan Pilihan Perkebunan sebagai berikut :
- a. Rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya angka kemiskinan petani
 - b. Lahan perkebunan yang semakin menyempit. 33
 - c. Akses ke sumber daya produktif yang terbatas diiringi rendahnya kualitas SDM perkebunan.
 - d. Penguasaan teknologi masih rendah.
 - e. Lemahnya infrastuktur di sektor perkebunan.

2. Peluang

- a. Letak geografis Musi Banyuasin. Letak geografis Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pintu masuk Provinsi Sumatera Selatan di bagian Timur merupakan penghubung Sumatera

Selatan dengan Provinsi Jambi sehingga dapat meningkatkan laju perkeonomian.

- b. Pemanfaatan Teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur.
- c. Terbukanya peluang investasi. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Banyuasin yang ditindak lanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) memberikan jaminan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat inovasi yaitu pengolahan lateks pekat menjadi bahan baku aspal karet.
- b. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah mulai uji coba bensin Sawit Ron 115 untuk meingkatkan kesejahteraan petani sawit.
- c. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah membentuk UPPB sebagai untuk lelang hasil bokar untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet.
- d. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin telah mereplanting sawit dari tahun 2017 sampai sekarang.
- e. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin akan mengadakan alat berat untuk membuka lahan perkebunan bagi kelompok tani dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Kelemahan

- a. Masih minimnya anggaran Dinas Perkebunan Musi Banyuasin sehingga program-program di jalankan secara bertahap
- b. Masih butuh bantuan dari pemerintah Pusat terkait DAK Fisik untuk merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil analisis gambaran pelayanan OPD, renstra K/L dan renstra OPD provinsi/kabupaten/kota, telaahan RTRW serta analisis KLHS.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan urusannya sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi Sub Sektor Perkebunan saat ini yang menjadi dasar prioritas pembangunan perkebunan, terdapat 6 permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan yang menjadi isu-isu penting, yaitu :

1. Produktivitas dan mutu yang masih rendah

Produktivitas tanaman perkebunan, yaitu produksi yang dicapai per satuan luas, masih dibawah standar yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal terkait dengan aspek budidaya, yaitu penggunaan benih/bibit yang tidak unggul dan bermutu, cara penanaman yang belum sesuai teknologi dan pemeliharaan tanaman yang belum 36 intensif, serta belum adanya teknologi yang efektif jika terjadi anomali cuaca. Disamping produktivitas, mutu produk yang dihasilkan oleh petani pekebun juga masih dibawah standar atau belum sesuai dengan permintaan konsumen, karena masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil yang baik.

2. Semakin terbatasnya lahan yang subur untuk budidaya perkebunan.

Pada awalnya sentra pengembangan komoditi perkebunan pada lokasi lahan yang subur, yang sering dikenal sebagai lahan historis pengembangan komoditi perkebunan. Namun seiring dengan kebutuhan pangan, khususnya beras yang makin besar, maka pemerintah mengambil kebijakan lahan-lahan subur tersebut lebih diprioritaskan untuk tanaman pangan (padi). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan tanaman perkebunan bergeser dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal, lahan marginal dan lahan tidur yang secara teknis masih memenuhi persyaratan untuk dikembangkan komoditi perkebunan.

3. Rendahnya bahan organik tanah

Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman adalah sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah. Sifat kimia tanah meliputi kadar unsur hara dalam tanah, baik makro maupun mikro, kejenuhan basah, kapasitas pertukaran kation, pH dan kadar bahan organik tanah. Kadar bahan organik tanah sebenarnya relatif lebih mudah untuk diperbaiki dengan teknologi yang ada, antara lain dengan menambahkan bahan organik atau pupuk organik kedalam tanah. Namun kenyataannya, kondisi saat ini bahan organik tanah di Kabupaten Musi Banyuasin sangat rendah. Sementara tanaman perkebunan membutuhkan tanah berkadar bahan organik tinggi. Kadar bahan organik yang tinggi, akan memperbaiki struktur tanah, biologi tanah dan juga kemampuan absorpsi hara maupun daya simpan lengas tanah. Tingginya kemampuan absorpsi berarti daya pegang tanah terhadap unsur-unsur hara tinggi dan selanjutnya melepaskannya untuk diserap akar.

4. Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan

Dalam rangka peningkatan produksi dan nilai tambah produk perkebunan, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk peningkatan produksi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, antara lain jalan produksi, alat pengolah tanah, alat pengendali hama penyakit dan lain-lain. Sementara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka peningkatan nilai tambah, antara lain : alat panen, alat pengolahan hasil, dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang dimiliki petani pada saat ini masih sangat kurang, sementara kemampuan petani untuk mengadakan secara swadaya masih belum mampu sepenuhnya. Terlebih saat ini, minat tenaga kerja muda di pedesaan untuk bekerja di sektor perkebunan sangat kecil, mereka lebih senang bekerja di industri, sehingga 37 di pedesaan mulai kekurangan tenaga kerja yang mau bekerja di perkebunan. Oleh karena itu, peralatan pertanian modern (traktor) sudah sangat dibutuhkan.

5. Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi perkebunan

Pengendalian hama/penyakit dan upaya menekan gangguan usaha komoditi perkebunan, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, tetapi untuk memperkecil kehilangan produksi, karena serangan hama penyakit tanaman dan adanya gangguan usaha, berpotensi untuk dikendalikan. mengurangi produktivitas, sehingga perlu

6. Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan

Di Kabupaten Musi Banyuasin, telah berkembang kelembagaan petani dengan cukup banyak, baik dalam bentuk Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Ada kelembagaan petani perkebunan yang sudah memiliki akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan dengan baik, tetapi sebagian besar masih perlu untuk ditingkatkan kemampuannya. Di harapkan kelembagaan petani perkebunan mampu menjadi agen pembangunan perkebunan yang dapat mengakses berbagai aspek teknologi modern dan pasar yang berkembang sangat dinamis.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025

Bahwa dalam proses penyusunan Perubahan RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan PD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun rancangan akhir RKPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada tema pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yaitu ***“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”***.

Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin mendukung melalui 1 Prioritas Daerah (PD) yaitu *Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi*, yang dilakukan melalui : Program Prioritas Daerah 1 yaitu Peningkatan Produktivitas serta Kualitas Komoditas Untuk Pemenuhan Kebutuhan Domestik dan Hilirisasi.

Proses Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dan apa saja target kinerja pada renstra yang diakomodir ataupun tidak di akomodir dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang didanai atau dilaksanakan di tahun tersebut sehingga dapat diketahui penyebab tidak tercapainya beberapa target kinerja yang sudah dicantumkan di dalam renstra. Untuk memudahkan analisis review yang terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perkebunan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel T-C.31 dibawah ini.

TABEL C.31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RKPD (DATA RENJA 2025)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN DANA (DATA DARI SIPD ;2025;RKPD;LAPORAN;RANCANGAN)					
NO	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Muba	Pesentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	25.740.000.000	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten /Kota Urusan Daerah	Kab. Muba	Pesentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan tepat waktu Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran Persentase Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	25.740.000.000	
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	110.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	276.256.830	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyelenggaraan Forum PD	8 Dokumen	63.560.830	

2	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.017.000,00	
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Muba	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	300.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Muba	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	193.679.000,00	
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.441.996.883,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bln	6.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bln	6.441.996.883,00	
I.III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	52.440.000,00	
5	Pengamanan Barang barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	80.000.000	Pengamanan Barang barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	52.440.000,00	
I.IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	95.496.000,00	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Muba	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Muba	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	22.880.000,00	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Muba	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	170.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Muba	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	72.616.000,00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	

II.V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.120.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	801.831.468,00	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.874.729,00	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan	2 Paket	125.995.781,00	
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.166.561,00	
12	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.540.164,00	
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	250.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	111.529.233,00	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	170.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	40.000.000,00	
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Muba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Muba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.130.000,00	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208.595.000,00	
II.VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	10.850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	68.288.750,00	
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	700.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muba	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muba	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
19	Pengadaan Alat Besar	Kab. Muba	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 unit	8.000.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kab. Muba	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	

20	Pengadaan Mebel	Kab. Muba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Muba	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	68.288.750,00	
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	900.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
II.VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Muba	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.100.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Muba	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.512.564.000,00	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.664.000,00	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muba	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.650.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muba	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.320.900.000,00	
II.VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.000.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	466.632.800,00	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	249.890.000,00	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Muba	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Muba	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 unit	0	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor lainnya	Kab. Muba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor lainnya	Kab. Muba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	156,293,800.00	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Kantor lainnya	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Kantor lainnya	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	60.449.000,00	
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,85%	5.250.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,85%	6.712.491.325,00	

III.I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	1.050.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	3.111.455.300,00	
29	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Kab. Muba	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Luas Lahan Kebun Sawit yang diawasi Jumlah Luas Lahan Kebun Sawit yang akan di Replanting	12 Laporan 17000 Ha 2000 Ha	550.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Kab. Muba	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Luas Lahan Kebun Sawit yang diawasi Jumlah Luas Lahan Kebun Sawit yang akan di Replanting	12 Laporan 17000 Ha 2000 Ha	230.476.500,00	
30	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Kelompok Tani yang di bantu Sarana Pendukung Pertanian	15 Laporan 5 Kelompok Tani	500.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Kelompok Tani yang di bantu Sarana Pendukung Pertanian	15 Laporan 5 Kelompok Tani	2.880.978.800,00	
III.II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	4.200.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	3.601.036.025,00	
31	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Muba	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah Sarana dan Prasarana Kebun Pembibitan yang disediakan	3 VUB 18 Unit	4.000.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Muba	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah Sarana dan Prasarana Kebun Pembibitan yang disediakan	3 VUB 18 Unit	3.500.498.025,00	
32	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Muba	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	200.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Muba	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.538.000,00	
IV	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,85%	6.750.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,85%	7.495.755.776,00	
IV.I	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	350.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	200.049.000,00	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15 Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15 Laporan	200.049.000,00	

34	Penyusunan Masterplan Pengembangan Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kab. Muba	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	15 Dokumen	0	Penyusunan Masterplan Pengembangan Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kab. Muba	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	15 Dokumen	0	
IV.II	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	6.400.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	7.295.706.776,00	
35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	2.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Muba	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	2.500.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Muba	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	6.995.707.014,00	
38	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kab. Muba	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	450.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kab. Muba	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
39	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Muba	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	450.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Muba	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
40	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Muba	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Muba	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	299.999.762,00	
V	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,55%	14.000.000.000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab. Muba	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,55%	14.235.733.609,00	
V.I	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	14.000.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	14.235.733.609,00	
41	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Kab. Muba	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah petani yang mendapat pelatihan OPT	50 Ha 25 Orang	400.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Kab. Muba	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah petani yang mendapat pelatihan OPT	50 Ha 25 Orang	200.247.131,00	

42	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Muba	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	914602,3 Ha 15 Laporan	13.500.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Muba	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	914602,3 Ha 15 Laporan	13.990.486.478,00	
43	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Peta Daerah Rawan Kebakaran Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen 15 Laporan	100.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Peta Daerah Rawan Kebakaran Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen 15 Laporan	45.000.000,00	
VI	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Muba	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya	2,15%	500.000.000	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Muba	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya	2,15%	385.839.000,00	
VI.I	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	500.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	385.839.000,00	
44	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan 12 Laporan	500.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Aplikasi Pelaporan Pelaku Usaha Perkebunan yang dikembangkan Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan 12 Laporan	385.839.000,00	
VII	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani	2,15%	5.000.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani	2,15%	3.570.703.696,00	
VII.I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100%	5.000.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100%	3.570.703.696,00	

45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Muba	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit 180 Orang 150 Orang	350.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Muba	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Petani yang mengikuti Sosialisasi Kemitraan Jumlah Petani yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	15 Unit 180 Orang 150 Orang	1.348.148.946,00		
46	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	4.350.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	2.122.142.000,00		
47	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Muba	Jumlah badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	300..000.000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Muba	Jumlah badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	100.412.750,00		
TOTAL					55.860.000.000	TOTAL					42.116.030.137,00	

Berdasarkan hasil analisis review rancangan akhir Renja Dinas Perkebunan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, sebagian besar subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mengalami perubahan jumlah anggaran dari perencanaan awal. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran pemerintah daerah serta pertimbangan dari urgensi yang menjadi prioritas.
2. Dari 46 subkegiatan yang direncanakan pada rencana awal, pada tahap rancangan akhir terdapat satu program, kegiatan, dan subkegiatan yang di tiadakan akibat perubahan nomenklatur dan melebur ke program dan kegiatan lain dan terdapat penambahan satu subkegiatan baru.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang melebur yaitu program penyelenggaraan statistik sektoral yang melebur ke program penunjan urusan pemerintahan kabupaten/kota. Namun program tersebut tetap eksis dan didanai untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk subkegiatan tambahan yaitu subkegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit yang muncul akibat adanya usulan aspirasi masyarakat.

3. Selain itu, dari 46 subkegiatan yang direncanakan pada rancangan awal, setelah memasuki tahapan penyusunan rancangan akhir, terdapat 11 subkegiatan tidak diakomodir atau tidak didanai. Sehingga tersisa 35 subkegiatan dan 1 subkegiatan tambahan. Kesebelas subkegiatan tersebut diantaranya yaitu;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.
4. Kemudian, terkait pendanaan antara total pendanaan pada rencana awal dengan rencana akhir tentunya berbeda karena mendapati banyak pengurangan akibat beberapa subkegiatan yang tidak didanai. Pagu anggaran rencana awal yaitu **Rp. 55.860.000.000**, pada rancangan akhir menjadi **Rp. 42.116.030.137,00**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin akan menampung dan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat pada Musrenbang Kecamatan Pada Tahun 2024 akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, sedangkan yang bersifat bantuan dan hibah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dapat mengusulkan dengan menyampaikan proposal pada 1 tahun sebelum berjalan.

Program dan kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam penganggaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kegiatan dari aspirasi dan keinginan masyarakat. Tahapan yang dilalui dalam menghimpun kegiatan dimulai dari penyusunan program tingkat desa untuk menggali apa keinginan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat kecamatan yang dilakukan untuk menverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan melakukan perengkingan, hasil dari perengkingan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan program tingkat kabupaten.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;

2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti dibawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Musi Banyuasin

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Satuan	Catatan
		usulan	Alamat				
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Jalan Setapak untuk ke kebun/Jalan Produksi	Dusun 1, Kab. Musi Banyuasin	Tersedianya Prasarana perkebunan	1	KM	Musren
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian						
	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Produksi merupakan penunjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, jalan produksi yang layak akan mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian atau kebun. dan juga mengurangi biaya oprasional masyarakat. oleh karena itu Desa Membutuhkan Rehabilitasi Jalan Produksi sepanjang 2.000 M.	Dusun 6, Kab. Musi Banyuasin		2	km	Musren
		Pembangunan Jalan Produksi	Dusun 1,2,3,4, Kab. Musi Banyuasin		1	km	Musren
		Pembagunan Jalan Produksi	Rt 03 dan 05, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Musren
		Pembangunan Jalan Produksi	Rt. 10 Dusun III, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Pembanguan jalan kebun	Pembangunan jalan kebun, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		kondisi jalan produksi yang tidak memadai	KT. Mukti Aji, Kab. Musi Banyuasin		1	km	Musren
		Perlu adanya perkerasan jalan produksi menuju kebun masyarakat	DUSUN 3,4 DESA DAWAS, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		adanya jalan usaha tani yang sulit di lalui oleh masyarakat	Dusun IV, V, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Karena Jalan Perkebunan yang Berlokasi dari dusun 4 ke 5 Rusak dan dari dusun 5 ke Dusn 4 sama Rusak dan Hancur	Dusun 4 dan 5, Kab. Musi Banyuasin		2	km	Musren
		Jalan Usaha Tani Belum Pernah disentuh Pembangunan Sedangkan Akses Masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian	Rt 01 S/d Rt 17 Dusun I S/d IV Volume 3000 x 3 M x 0,15 , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		mengingat kondisi jalan menuju mengambil kasil Masyarakat Desa Mandala Sari Kurang layak dan Rusak Parah Mangka Perlu di adakannya Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dengan Volume Panjang 3,5 KM dan Lebar 5 M	Rt. 08 Dusun 02 dan Rt 10 Dusun 03 Desa Mandala Sari, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Jalan Usaha Tani yang sudah tidak layak	dusun V, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren

		jalan yang di gunakan warga untuk kekebun yg dilalui setiap hari sangatlah memprihatinkan,,sehingga saat musim hujan warga desa sangat kesulitan untuk melalui jalan tersebut untuk kekebun	Dusun 3 Desa Purwosari,, sepanjang 7 km, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Kondisi Jalan Produksi yang tidak memadai untuk masyarakat melakukan aktifitas dan mengeluarkan hasil kebun.	RT. 19 Dusun 5, Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Musren
		Permohonan pengerasan jalan produksi di Desa SUMber Rejeki sepanjang Tujuh Km	Desa Sumber Rejeki, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Pembuatan Jalan Produksi/ Jalan Hasil Usaha Tani sepanjang 5000 m	Dusun 1 Desa Sri Mulyo, Kab. Musi Banyuasin		5000	M	Musren
		Pembangunan Jalan Produksi	Dusun 1 Desa Sungai Angit, Kab. Musi Banyuasin		1000	M	Pokir
		Pembuatan Jalan Ke Kebun	Dusun 6 Desa Sugi Waras, Kab. Musi Banyuasin		1000	M	Musren
		Pembangunan Jalan Menuju Kebun (jalan Produksi) Sepanjang 5000 m	Dusun 4,5,6, & 7, Kab. Musi Banyuasin		5000	M	Musren
		Belum adanya Jalan Menuju perkebunan sebab itu ingin membuat pengajuan berVolume 2 KM	Dusun II, Kab. Musi Banyuasin		2	km	Musren
		jalan produksi desa supat barat dalam kondisi rusak perlu cor beton	DUSUN 4 DESA SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin		500	M	Musren
		jalan perkebunan dalam kondisi rusak perlu pengerasan	DUSUN 1 DESA SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan di Desa Sugi Waras	Desa Sugi Waras Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya	Dusun III Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan , Kab. Musi Banyuasin		4	km	Pokir
		Lanjutan Pengerasan jalan Produksi Desa Karang Waru	Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		500	M	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Karang Waru dengan Batu Pecah	Dusun 1 dan Dusun 2 di belakang Desa Karang Waru, Kab. Musi Banyuasin		1500	M	Pokir
		Pengerasan Jalan Produksi Dusun III Desa Rantau Kasih	Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi/Perkebunan Desa Bukit Sejahtera	Dusun I sampai dengan Dusun IV Desa Bukit Sejahtera Kec. BHL, Kab. Musi Banyuasin		5	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Dusun 1 Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat	Dusun 1 Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat , Kab. Musi Banyuasin		5	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Desa Talang Leban Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin	Desa Talang Leban Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir

		Pengerasan Jalan produksi Desa Saud Desa Saud Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin	Desa Saud Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Pokir
		Pembangunan jalan produksi dusun 1, 2 dan 3 Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman dengan cor beton	Dusun 1 Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman , Kab. Musi Banyuasin		10	KM	Pokir
		Peningkatan jalan perkebunan warga Dusun I menuju Epil Barat	Desa Lais Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		1	Km	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Desa Sugiraya Kec. Babat Toman	Desa Sugiraya Kec. Babat Toman , Kab. Musi Banyuasin		450	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dan Pemasangan gorong-gorong dari Dusun 3 menuju Dusun 2 Desa Talang Buluh Kec. Batang Hari Leko	Desa Talang Buluh Kec. Batang Hari Leko , Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir
		Pembangunan jalan produksi dari Pangkalan Aman menuju Talang Bayas Desa Toman Kec. Babat Toman	Desa Toman Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		1	Km	Pokir
		Rehab Jalan Produksi Rt.17 Dusun II Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir	Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		20000	meter	Pokir
		Pembangunan jalan Produksi Dusun I dan III Desa Rimba Ukur	Dusun I dan III Desa Rimba Ukur , Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Pokir
		Peningkatan jalan Produksi dengan batu Agregat di Taurus Desa Sri Gunung	Desa Sri Gunung Kec.Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin		3000	Meter	Pokir
		Peningkatan jalan Produksi dengan batu Agregat di Desa Suka Damai Baru Kec. Sungai Lilin	Desa Suka Damai Baru Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		4000	Meter	Pokir
		Peningkatan jalan Produksi dengan batu Agregat di Desa Tenggaro Kec.Keluang	Desa Tenggaro Kec.Keluang , Kab. Musi Banyuasin		800	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dengan Batu Agregat di Desa Tegal Mulyo Kec. Keluang	Desa Tegal Mulyo Kec. Keluang , Kab. Musi Banyuasin		3000	Meter	Pokir
		Pembangunan jalan Produksi Dusun I dan III Desa Rimba Ukur	Dusun I dan III Desa Rimba Ukur , Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Dusun I Desa Sungai Angit	Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Dusun III Desa Sungai Angit	Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		1	KM	Pokir
		Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan Masyarakat Desa Srimulyo	Desa Srimulyo Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		4000	M	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dari Perbatasan Desa Danau Cala menuju Desa Rantau Keroya	Desa Danau Cala Kec Lais, Kab. Musi Banyuasin		6	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Dusun IV Desa Petaling Kec Lais	Dusun IV Desa Petaling Kec Lais, Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Di Dusun 4 dan Dusun 3 Desa Seratus Lapan Kec Babat Supat	Di Dusun 4 dan Dusun 3 Desa Seratus Lapan Kec Babat Supat, Kab. Musi Banyuasin		6	KM	Pokir

		Pembangunan Jalan produksi di Desa Epil Barat Kec Lais	Desa Epil Barat Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Tunas Muda di Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir	Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Rehab jalan produksi perkebunan Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman	Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		1500	M	Pokir
		Pembangunan jalan produksi menuju usaha perkebunan dusun I Desa Karang Anyar Kec. Lawang Wetan	Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir
		Pembangunan jalan perkebunan desa Sugi Waras ke Lebung Panjang Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman	Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		200	M	Pokir
		Peningkatan jalan produksi perkebunan dusun I dan II Desa Tampang Baru Kec. Bayung Lencir	Dusun I dan II Desa Tampang Baru Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		5	KM	Pokir
		Pembangunan sumur bor di kebun paye buluh H. Amkahar Kelompok Tani Pengaturan Sejahtera Desa Pengaturan Kec. Batanghari Leko	Desa Pengaturan Kec. Batanghari Leko, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Sukarami	Desa Sukarami Kecamatan Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		4	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Plakat Tinggi	Desa Sumber Rezeki Kecamatan Plakat Tinggi , Kab. Musi Banyuasin		12000	meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Rt. 03 Dusun 10 Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi	RT.03 Dusun 10 Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi , Kab. Musi Banyuasin		2000	meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Dusun 5 Blok Bali Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi	Dusun 5 Blok Bali Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi , Kab. Musi Banyuasin		200	meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Menuju Perkebunan Dusun II Desa Lais	Dusun II Desa Lais Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi Dusun 1 Desa Tanjung Agung Utara	Dusun 1 Desa Tanjung Agung Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		800	Meter	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi Desa Tanjung Agung Utara	Desa Tanjung Agung Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		400	Meter	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi dari Teluk Jambi Selinca dan Teresan	Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		3000	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Desa Teluk	Desa Teluk Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		200	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Dusun 4 Belakang Kantor Polsek Desa Teluk	Dusun 4 Desa Teluk Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		2000	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Dusun 4 Sungai Seluang Desa Teluk	Dusun Sungai Seluang Desa Teluk Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	Meter	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi Dusun 2 Desa Rantau Keroya	Peningkatan Jalan Produksi Desa Tanjung Agung Utara , Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir

		Peningkatan Jalan Produksi Desa Tanjung Agung Utara	Desa Tanjung Agung Utara Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		400	M	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi dari Teluk Jambi Selinca dan Teresan Desa Tanjung Agung Timur	Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		3	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Dusun 4 Belakang Kantor Polsek Desa Teluk	Dusun 4 Desa Teluk Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Dusun 4 Sungai Seluang Desa Teluk	Dusun Sungai Seluang Desa Teluk Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		10	km	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi di Tamiang Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu	Pembangunan Jalan Produksi di Tamiang Kelurahan Balai Agung Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		3	km	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dari Sungai Dua Talang Tebat Uman Menuju Talang Latif Desa Bailangu Kecamatan Sekayu	Pembangunan Jalan Produksi dari Sungai Dua Talang Tebat Uman Menuju Talang Latif Desa Bailangu Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		10	km	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dari Talang Bukit Temberas ke Talang Hayat dan Talang Hadis Desa Bailangu Kecamatan Sekayu	Pembangunan Jalan Produksi dari Talang Bukit Temberas ke Talang Hayat dan Talang Hadis Desa Bailangu Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		4	km	Pokir
		Pembangunan jalan produksi di Dusun IV Desa Sinar Jaya Kec. Jirak Jaya	Dusun IV Desa Sinar Jaya Kec. Jirak Jaya , Kab. Musi Banyuasin		500	m	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi Di Dusun X Desa Air Pith Ulu Kec. Plakat Tinggi	Dusun X Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi , Kab. Musi Banyuasin		3	km	Pokir
		Lanjutan Peningkatan Jalan Produksi di Dusun VI Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu (Kelompok Tani Madiyo”)	Dusun VI Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		8	km	Pokir
		Peningkatan jalan produksi RT 12 dan 13 Dusun 3 Desa Sindang Marga dengan cor beton	RT 12 dan 13 Dusun III , Kab. Musi Banyuasin		1	km	Pokir
		Pembangunan jalan produksi di RT 2 Dusun III Desa Baru jaya Kecamatan Jirak Jaya	RT 2 Dusun III Desa Baru jaya Kecamatan Jirak Jaya , Kab. Musi Banyuasin		2000	m	Pokir
		Pembangunan jalan produksi di RT 2 Dusun III Desa Baru jaya Kecamatan Jirak Jaya Lanjutan Peningkatan Jalan Produksi di Dusun VI Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu (Kelompok Tani Madiyo”)	Dusun VI Desa Rimba Ukur Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		8	km	Pokir
		Pembangunan jalan produksi di dusun 5 desa Kertajaya Kec. Sungai Keruh	Dusun 5 desa Kertajaya Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin		2	KM	Pokir
		Pembangunan Jalan produksi Rt.10 desa Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		500	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan produksi Rt.12 desa Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		2500	meter	Pokir

		Pembangunan Jalan Produksi Rt. 04 Desa Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1000	meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Sri Mulyo Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan bayung Lencir	Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1500	Meter	Pokir
		Pengerasan Jalan Produksi Rt. 02 Dusun 01 Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		3000	Meter	Pokir
		Rehabilitas Jalan Produksi Dari Lintas Menuju Kebun PT. ATM MAS Muara Bahar Rt. 30 Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		4200	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Prouksi Rt. 14 Dusun 4 Desa Sukajaya	Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		2600	Meter	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dari Sport Center Mekar jaya sampai PT. Mas	Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi Rt. 24 S.d Rt 27 Desa Mekar Jaya	Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		6000	Meter	Pokir
		Penimbunan Jalan Produksi Rt. 06 dusun 5 Desa Muara Medak	Desa Muara Medak kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Pembangunan Jalan Produksi dari Rt. 11 Menuju Rt. 13 Dusun 02 Desa lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		2000	Meter	Pokir
		Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Desa Suka jaya	Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		50	Ha	Pokir
		Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pandan Sari	Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin		24000	Meter	Pokir
		Perbaikan Jalan Produksi Plasma antar Desa Pandan sari, Bero Jaya Timur dan desa sinar Tungkal	Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin		8000	Meter	Pokir
		Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi PS2 Desa Pandan Sari	Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin		1000	Meter	Pokir
		Peningkatan Jalan Produksi Km. 3 Desa Bandar Jaya	Km. 3 Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	km	Pokir
	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	air parit skunder tidak mengalir karena dangkal dan tertutup rumput sehingga banjir terhadap lahan warga	DUSUN 1-5 DESA BANDAR TENGKULANG, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Lahan masyarakat selalu banjir	Rt 11 dusun 03, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Plat Decker Jalan Usaha Tani di Desa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan, Kab. Musi Banyuasin		5	Paket	Pokir
2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
	Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Belum adanya lapak UPPB sehingga diperlukan pembangunan Lapak UPPB	UPPB Berlian Jaya Maju , Kab. Musi Banyuasin	Tersedianya gedung pemasaran/ lelang	1	unit	Musren
		Belum adanya gedung UPPB	UPPB Berlian Jaya Maju, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Musren

		perlunya pembeku lateks sebanyak 500 l untuk kelompok UPPB Berlian Jaya Maju	UPPB Berlian Jaya Maju, Kab. Musi Banyuasin		500	liter	Musren
		Bantuan Fasilitas UPPB Desa Suka jaya: Laptop, printer, timbangan, bibit karet 10.000 batang, motor roda tiga, bak pencetak karet 1.000 pcs, dan genset	Desa Suka Jaya, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Musren
		Belum adanya Lapak UPPB Peninggalan Bersatu	UPPB Peninggalan Bersatu, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Musren
		Belum adanya gedung kantor UPTD Perkebunan	Desa Peninggalan, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Belum adanya lapak UPPB Tani Jaya Desa Banjar Jaya	UPPB Tani Jaya, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Musren
		Belum adanya gedung UPPB Tani Jaya Desa Banjar Jaya	UPPB Tani Jaya, Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Musren
		Diperlukannya Intensifikasi Kebun Karet UPPB Rimba Makmur Desa Sri Mulyo	UPPB Rimba Makmur , Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Musren
		Pembuatan Gedung UPPB Dusun I Desa Layan Kecamatan Jirak Jaya	Dusun I Desa Layan Kecamatan Jirak Jaya , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Bantuan kendaraan roda tiga (Betor) untuk usaha Petani Gambir Desa Toman Kec. Babat Toman.	Desa Toman Kecamatan Babat Toman., Kab. Musi Banyuasin		1	unit	
		Pembangunan Lapak Lelang Karet di Mendis Maju Bersama Desa Mendis	Desa Mendis Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Pokir
		pengadaan bak pembeku getah karet	MEKAR JAYA, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan bak pembeku getah karet	SIMPANG BAYAT, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan bak pembeku getah karet	SINDANG MARGA, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan bak pembeku getah karet	MENDIS, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan kendaraan roda tiga alat angkut bokat	MENDIS, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan bak getah karet	TELANG, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan kendaraan roda tiga alat angkut bokar	TELANG, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		pengadaan bak pembeku getah karet	PANGKALAN BAYAT, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Pemeliharaan Kebun Sawit Kelompok Tani (Pengaturan Sejahtera dan Aur Gading) 200 Ha	DUSUN III, Kab. Musi Banyuasin		-	0	Musren
		UPPB Panca Makmur Desa Panca Tunggal	UPPB Panca Makmur Desa Panca Tunggal, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB Tani Mandiri Desa Bumi Kencana	UPPB Tani Mandiri Desa Bumi Kencana, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB Karya bersama Kelurahan sungai lilin	UPPB Karya bersama Kelurahan sungai lilin, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB berkah Rizki Desa sumber Rejeki Sungai lilin	UPPB berkah Rizki Desa sumber Rejeki Sungai lilin, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB Makmur Bersama Desa Suka damai Baru	UPPB Makmur Bersama Desa Suka damai Baru, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB Berkah Serasan Desa Nusa serasan	UPPB Berkah Serasan Desa Nusa serasan, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren

		UPPB Sumber Rezeki Desa Cinta damai	UPPB Sumber Rezeki Desa Cinta damai, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		UPPB Mitra Berlian Desa Berlian Makmur	UPPB Mitra Berlian Desa Berlian Makmur, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Pembangunan Gedung UPPB 2 Unit Perlu Alat Angkut untuk narik hasil Karet Masyarakat Bantuan Bentor	Dusun 1,Dusun 2.Dusun 3 dan Dusun 5 Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin		-	-	Musren
		Pengadaan Bentor untuk mengangkut hasil getah karet masyarakat Desa Teluk Kec. Lais	Desa Teluk Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		5	Unit	Pokir
		Perlu Alat Angkut untuk narik hasil Karet masyarakat Bantuan Bentor	dusun 1 Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Musren
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, danMikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Bibit Karet Unggul	Desa Sungai Medak, Kab. Musi Banyuasin		2	paket	Musren
	Penjaminan Kemurnian dan SDG Tanaman	Pengadaan bibit sawit Desa Pinggap	Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin		2	Paket	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit untuk Kelompok Tani Desa Talang Buluh Kec. Batang Hari Leko	Desa Talang Buluh Kec. Batang Hari Leko , Kab. Musi Banyuasin		2000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit untuk Kelompok Tani Tunas Hijau Desa Panai Kec. Sanga Desa	Desa Panai Kec. Sanga Desa , Kab. Musi Banyuasin		7000	batang	Pokir
		Bantuan bibit Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Maju Bersama Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman	Desa Muara Punjung Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Bantuan Pupuk untuk Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan , Kab. Musi Banyuasin	Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan , Kab. Musi Banyuasin	Terlaksananya penyediaan Saprodi untuk Kelompok tani/UPPB	1	Ton	Pokir
		Penyediaan bantuan bibit karet untuk Kelompok Tani Dusun 1Dusun 1 Desa Lais Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin	Dusun 1 Desa Lais Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		4000	batang	Pokir
		Penyediaan Bantuan Bibit Sawit untuk Kelompok Tani Dusun 1 Dusun 1 Desa Lais Utara Kec. Lais	Dusun 1 Desa Lais Utara Kecamatan Lais. , Kab. Musi Banyuasin		4000	Batang	Pokir
		Penyediaan Bibit Sawit untuk kelompok tani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir	Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit untuk Kelompok Tani Dusun I Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin	Dusun I Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		5000	Batang	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Sumber Rezeki" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	pok	Pokir

		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Makmur" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	POK	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Untung" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	Pok	pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Maju" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	KELOMPOK	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Karya Tani" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	Kelompok	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Utama Karya" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	kelompok	Pokir
		Bantuan Bibit Buah-buahan Desa Sukarami	Desa Sukarami Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	kelompok	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Sabar Jaya" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	klmpok	Pokir
		Bantuan Bibit sawit kelompok tani "Murni" di Desa Sungai Batang	Desa Sungai Batang Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	kelompok	Pokir
		Bantuan Bibit Karet untuk Kelompok Tani Dusun I Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin	Dusun I Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		5000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit sawit untuk Kelompok Tani Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin	Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		20000	Batang	Pokir
		Bantuan Bibit Karet untuk Kelompok Tani Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin	Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		20000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk untuk Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Petaling Kec. Lais	Kelompok Tani jaya Makmur Dusun II Desa Petaling Kec Lais, Kab. Musi Banyuasin		1	Kelompok	Pokir
		Bantuan pengadaan bibit sawit kelompok tani Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman	Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		15000	Batang	Pokir
		Bantuan bibit sawit Kelompok Tani Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa	Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin		400	Batang	Pokir
		Bantuan bibit sawit untuk kelompok Tani Mandi Angin Makmur Desa Sungai Dua	Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh , Kab. Musi Banyuasin		5000	bibit	Pokir
		Bantuan pengadaan bibit sawit kelompok tani pengaturan sejahtera dan aur gading sejahtera Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko	Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin		21000	Batang	Pokir

		Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Desa Bailangu Kecamatan Sekayu	Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Desa Bailangu Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		15000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu	Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		15000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu	Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		15000	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Sawit Untuk Kelompok Tani Desa Suka jaya	Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		7000	Bibit	Pokir
		Penyediaan Bibit Sawit Rt. 28 Dusun III Desa Mekar Jaya	Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Bantuan pengadaan bibit sawit kelompok tani harapan makmur desa ngunang kec. Sanga desa	Desa Ngunang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir
		Bantuan Bibit Kelapa Sawit untuk kelompok tani Desa Sungai Medak	Desa Sungai Medak Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		10000	bibit	Pokir
		Bantuan Bibit Karet Unggul untuk kelompok tani Desa Sungai Medak	Desa Sungai Medak Kec. Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		10000	Bibit	Pokir
		Bantuan bibit Buah-buahan untuk Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin	Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		100	Batang	Pokir
		Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rantau Musi Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rantau Musi Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais, Kab. Musi Banyuasin		1	Kelompok	Pokir
		Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais	Dusun 4 Desa Teluk Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		10000	batang	Pokir
		Bantuan bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Agung Selatan	Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		1000	batang	Pokir
		Bantuan bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Agung Timur	Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		1000	batang	Pokir
		Pengadaan bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Agung Selatan	Desa Tanjung Agung Selatan Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	Batang	Pokir
		Pengadaan bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Agung Timur	Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	Batang	Pokir
		Pengadaan bibit kelapa sawit Desa Tanjung Agung Barat	Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	Batang	Pokir
		Pengadaan bibit kelapa sawit di Desa Tanjung Agung Utara	Desa Tanjung Agung Utara Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	Batang	Pokir
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Dusun 4 Desa Teluk	Dusun 4 Desa Teluk Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin		10	batang	Pokir
		Bantuan Bibit Kelapan Sawit Untuk Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pulau Gading	Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Pokir
		Bantuan pengadaan bibit sawit kelompok tani desa terusan kec. Sanga desa	Desa Terusan Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin		2	Ha	Pokir

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	mengingat di Desa Mandala Sari Sektor Penghasilan Masyarakat dari Perkebunan dan Sumsidi pupuk sudah tidak ada untuk perkebunan dengan ini kami masyarakat Desa Mandala Sari sangat Membutuhkan Pupuk dengan Volume pupuk NPK untuk 25 X 250 KG, dolomit mass 100 untuk 25 x 3000, herbisida 25 x 5 ltr	Rt. 10 Dusun 03 Desa Mandala Sari, Kab. Musi Banyuasin		3	paket	Musren
		Kurangnya Sarana Prasarana Petani Karet	Alamat Desa mekar Sari RT 16 Dusun 04 Suratman POKTAN Tunas Pangan No. REG: 225906/11/012/KP-001/XXI/2013 volume Pupuk NPK 16.16.16 Untuk 25 x 250 Kg= 6.250 kg, Kapur Dolomit Mes 100 Untuk 25 x 3000 kg = 75.000kg , Kab. Musi Banyuasin		2	paket	Musren
		Kurangnya Sarana Produksi (sabras) Pupuk dan Herbisida (Intensifikasi tanaman kelapa) Bibit Kelapa Hibrida ,	Karya Makmur, Mujiono No.reg.262/BP3K/KAI/09/2010 Desa Perumpung Raya, Kab. Musi Banyuasin		2	paket	Musren
		"Kurangnya Sarana Produksi (sabras) Pupuk dan Herbisida (Intensifikasi tanaman kelapa) Bibit Kelapa Hibrida , "	"Karya Makmur, Mujiono No.reg.262/BP3K/KAI/09/2010 Desa Perumpung Raya, Kab. Musi Banyuasin" , Kab. Musi Banyuasin		2	paket	Musren
		Desa bandar agung merupakan desa yg penduduk nya bermata pencaharian berkebun sawit dan karet, permasalahan yg kami hadapi sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Oleh sebab itu melalui kelompok rukun Santoso kami mengusulkan untuk bisa diberikan akses pupuk	Dusun 2 desa bandar agung kelompok tani rukun Santoso , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Desa bandar agung merupakan desa yg penduduk nya bermata pencaharian berkebun sawit dan karet, permasalahan yg kami hadapi sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Oleh sebab itu melalui kelompok rukun Santoso kami mengusulkan untuk bisa diberikan akses pupuk Dusun 2 desa bandar agung kelompok tani sido Mulya	Kelompok tani sido Mulya bandar agung , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Pokir
		Bantuan Pupuk Urea, NPK, KCL untuk Kelompok Tani Maju Bersama Dusun III RT.13 Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya	RT 13 Dusun III Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin		500	Karung	Pokir
		Bantuan Pupuk Pertanian Berupa Pupuk Urea, KCL, dan NPK untuk 5 Kelompok Tani Dalam Kecamatan Tungkal Jaya	Untuk 5 Kelompok Tani Dalam Kecamatan tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin		500	Karung	Pokir
		Pengadaan Pupuk untuk kelompok tani di Srimulyo Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir	Dsea Muara Bahar Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Musren

		karena DAM yang rusak jadi luapan air pasang masuk ke pemukiman mengakibatkan rumah warga terendam air pasang	Rt 01.Rt 03.Rt 04 Dusun 01, dan Rt 05.Dusun 02 , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Bantuan Hand Sprayer Elektrik untuk Kelompok Tani Tunas Muda Desa Bailangu Timur	Desa Bailangu Timur, Kab. Musi Banyuasin		100	unit	Musren
		Bantuan Hand Sprayer Elektrik untuk Kelompok Tani Karang Jaya Desa Bailangu Tinur	Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin		100	unit	Musren
		Penyediaan Bantuan Alat Kobelco Mini untuk Kelompok Tani di Kecamatan Babat Supat	Kelompok Tani Kecamatan Babat Supat , Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Musren
		Pengadaan alat Pertanian Quick Truck Kelompok Tani Barokah Dusun 4 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir.	Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir. , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Pengadaan Cultivator Dusun 5 Desa Mulyo Rejo Kec. Sungai Lilin	Desa Mulyo Rejo Dusun 5 Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Pengadaa Alat Angkut Hasil Pertanian " Quick" Dusun 1 Desa Srigunung Kec Sungai Lilin	Dusun 1 Desa Sri gunung Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Pengadaan Quick Truck Dusun 1 Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin	Dusun I Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Pengadaan Quick Truck Dusun 5 Desa Mulyo rejo Kec. Sungai Lilin	Dusun 5 Desa Mulyo rejo Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyuasin		1	unit	Pokir
		Bantuan Excavator untuk Poktan Desa Lais Utara Kec. Lais	Desa Lais Utara Kec. Lais , Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Pokir
		Pengadaan Traktor Quick Cronos/ Babat Rumput Dorong untuk Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu	Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu , Kab. Musi Banyuasin		1	kelompok	Pokir
		Traktor untuk perkebunan warga desa	Tanjung Agung Utara, Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Musren
		Bantuan Mesin Rumput untuk Kelompok Tani Desa Bumi Ayu	Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		60	Unit	Pokir
		Bantuan Mesin Rumput untuk Kelompok Tani Desa Rantau Kasih	Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		60	Unit	Pokir
		Pengadaan Traktor Roda 4 untuk perkebunan Desa Sungai Medak	Desa Sungai Medak , Kab. Musi Banyuasin		2	unit	Pokir
		Pengadaan Excavator Mini untuk Desa Sri Gading Kecamatan Lalan	Desa Sri Gading Kecamatan Lalan, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Pokir
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembangunan pagar kantor UPT4K Perkebunan Kec.Lalan karena kantor belum di pagar	Rt 08 dusun 002 Desa Bandar Agung, VOLUME 25 X 50 M, Kab. Musi Banyuasin	Terlaksananya pembangunan gedung kantor lainnya	1	paket	Musren
		Pembangunan Paving Blok halaman Kantor UPT4K Perkebunan	RT 08 DUSUN 002 Desa Bandar Agung VOLUME 15 X 15 M, Kab. Musi Banyuasin		225	M2	Musren
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Desa Karang Waru	Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin	Terlaksananya Pembukaan lahan Tanpa Bakar	50	Ha	Pokir
		Bantuan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dalam Kecamatan Lawang Wetan	Dalam Kecamatan Lawang Wetan , Kab. Musi Banyuasin		50	Ha	Pokir
		Bantuan Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar untuk Kelompok Tani Karya Bangun Bersama	Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa , Kab. Musi Banyuasin		50	ha	Pokir
		Bantuan Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar untuk Kelompok Tani Karya Maju Bersama	Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa , Kab. Musi Banyuasin		50	Ha	Pokir
		Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Sejahtera Dusun 1 Desa Karang Anyar Kec. Lawang Wetan	Desa Karang Anyar Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		75	ha	Pokir
		Pembukaan lahan tanpa bakar untuk Kelompok Tani dalam Kecamatan Lawang Wetan	Kecamatan Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin		20	ha	Pokir
		Pembukaan lahan tanpa bakar untuk Kelompok Tani dalam Kecamatan Batang Hari Leko	Kecamatan Batang Hari leko, Kab. Musi Banyuasin		20	ha	Pokir
		Lanjutan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) kelompok tani pengaturan sejahtera dan aur gading sejahtera Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko	Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin		150	Ha	Pokir
		Bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) untuk kelompok tani Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman	Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin		100	Ha	Pokir
		Bantuan alat Berat untuk Kelompok Tani Desa Suka Jaya	Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin		1	Unit	Pokir
		Bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) untuk kelompok tani harapan makmur desa ngunang kec. Sanga desa	Desa Ngunang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin		161	Ha	Pokir
		Bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) untuk kelompok tani genteng desa talang sungai bujang muara rawas kec. Sanga desa	Desa Talang Sungai Bujang Muara Rawas kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin		28	Ha	Pokir
		Pembukaan Lahan untuk Perkebunan serta pengadaan bibit sawit Desa Tanjung Agung Barat	Desa Tanjung Agung Barat Kec. Laís , Kab. Musi Banyuasin		1	paket	Pokir
		Pembukaan Lahan untuk Perkebunan serta pengadaan bibit sawit	Desa Tanjung Agung Barat Kec. Laís, Kab. Musi Banyuasin		1	Paket	Pokir



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk meningkatkan maksud dari rencana kerja pembangunan perkebunan maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana kerja yang dipersiapkan saat ini.

a. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup sempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019, tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian Lembaga 2020-2024, maka Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

***“Pekebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya
Visi Presiden Republik Indonesia”***

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ♣ **Produktif**, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.

- ♣ Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
- ♣ Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019), yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pada prinsipnya, seluruh Misi Presiden Republik Indonesia tersebut dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga/Pemda, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, untuk menentukan prioritas kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian akan fokus dalam pelaksanaan misi yang kedua, yaitu Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, maka Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut adalah :

“MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN ASAL PERKEBUNAN SERTA KEBUTUHAN EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN DALAM MEMPERKUAT STUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

b. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal Tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2024 adalah ***“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”***. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

1. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)

Indikator ini menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Indonesia di luar negeri. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional merepresentasikan pertumbuhan ekonomi perkebunan nasional dari sisi pendapatan, dimana ekspor perkebunan menjadi faktor penentu meningkatnya ekspor pertanian nasional.

2. Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)

Indikator ini menggambarkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional secara domestik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penurunan impor produk perkebunan nasional, maka semakin tinggi nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional dibanding dengan produk impor sejenis. Selain itu indikator ini juga merepresentasikan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri atas komoditas perkebunan nasional.

3. Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Indikator ini merepresentasikan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang profesional dan akuntabel, melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Nilai reformasi birokrasi yang semakin meningkat menandakan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dimana hal ini juga berarti meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

a. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan

berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pada Renja Perangkat Daerah akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) PD dalam mendukung tercapainya misi tersebut. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan perkebunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya Perkebunan yang berkelanjutan lebih baik dan lebih sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan tema pembangunan yang harus dijadikan acuan oleh Perangkat Daerah ***“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”***. Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ada 14 Arah Kebijakan, Namun diantara 14 Arah Kebijakan tersebut hanya ada 2 yang terkait dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu : (4) Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kawasan Komoditas Unggulan; dan (6) Penyediaan Fasilitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Nilai NTP	1. Meningkatkan Jumlah kelompok usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI dan teregister (UPPB);	1. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI;
			2. Meningkatkan prasarana dan sarana pengembangan perkebunan;	2. Peningkatan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
			3. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan.	3. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan.
2.	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Meningkatnya dan Berkembangnya Infrastruktur	1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan;	1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, perluasan dan peremajaan komoditas strategis;
		Perkebunan serta Tersedianya Produksi	2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;	2. Pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan;
			3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya;	3. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan;
			4. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;	4. Peningkatan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;
			5. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;	5. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan;

Dalam pembangunan perkebunan serta cita-cita atau pandangan jauh kedepan yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan Kesejahteraan petani.
- (2). Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan
- (3). Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pertanian (Perkebunan).

Adapun dari ketiga tujuan pembangunan perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 tersebut memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai NTP, dengan indikator :
 - 1). Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (%)
2. Meningkatnya dan Berkembangnya Infrastruktur Perkebunan Serta Tersedianya Produksi, dengan indikator :
 - 1). Persentase Peningkatan Produktivitas Rat-Rata Komoditas Strategis Perkebunan yaitu Karet dan Kelapa Sawit (%)
3. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pertanian (Perkebunan), dengan indikator :
 - 1). Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pertanian (Perkebunan) (%)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, maka pada tahun 2025 Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- 6.3.2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6.3.2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 6.3.2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6.3.2.1.3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- 6.3.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.3.2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 6.3.2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 6.3.2.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 6.3.2.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6.3.2.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 6.3.2.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 6.3.2.4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
- 6.3.2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.3.2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.3.2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.3.2.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6.3.2.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.3.2.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.3.2.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.3.2.5.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6.3.2.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.3.2.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.3.2.6.1. Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.3.2.6.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.3.2.6.3. Pengadaan Alat Besar
 - 6.3.2.6.4. Pengadaan Mebel

- 6.3.2.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.3.2.6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.3.2.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.3.2.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3.2.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.3.2.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.3.2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.3.2.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6.3.2.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi perkebunan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- 6.3.3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 6.3.3.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 6.3.3.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 6.3.3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 6.3.3.2.1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - 6.3.3.2.2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan mengembangkan Prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi perkebunan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- 6.3.4.1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 6.3.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung Pertanian lainnya.

- 6.3.4.2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 6.3.4.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 6.3.4.2.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mengendalikan, mencegah dan membantu penanggulangan kejadian bencana perkebunan guna menyelamatkan produksi lahan perkebunan masyarakat. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- 6.3.5.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 6.3.5.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 6.3.5.1.2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 6.3.5.1.3. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi perizinan usaha perkebunan yang berlaku dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- 6.3.6.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.3.6.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan baik terhadap petugas maupun pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

6.3.6.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.3.6.1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

6.3.6.1.2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

6.3.6.1.3. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 akan di input melalui SIPD-RI setelah hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dan akan di jadikan tolak ukur untuk anggaran pada Tahun 2025.

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LEMBAR 1 DARI 5

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dinas Perkebunan				42.116.030.137,00				48.385.000.000,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				42.116.030.137,00				48.385.000.000,00
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				42.116.030.137,00				48.385.000.000,00
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	9.715.506.731,00			-	14.230.000.000,00
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	276.256.830,00			100% 100%	540.000.000,00
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	8 Dokumen	63.560.830,00	PAJAK DAERAH		4 Dokumen	100.000.000,00
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	2 Laporan	19.017.000,00	PAJAK DAERAH		4 Laporan	40.000.000,00
	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	193.679.000,00	PAJAK DAERAH		1 Data	400.000.000,00
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	6.441.996.883,00			100%	7.500.000.000,00
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/bulan	6.441.996.883,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		60 Orang/bulan	7.500.000.000,00
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	52.440.000,00			100%	100.000.000,00
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	6 Dokumen	52.440.000,00	PAJAK DAERAH		6 Dokumen	100.000.000,00
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 % 100 %	95.496.000,00			100%	260.000.000,00
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	22.880.000,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	90.000.000,00

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	191.664.000,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	450.000.000,00
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.320.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	1.700.000.000,00
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	466.632.800,00			100%	1.200.000.000,00
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	6 Unit	249.890.000,00	PAJAK DAERAH		6 Unit	350.000.000,00
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	156.293.800,00	PAJAK DAERAH		2 Unit	700.000.000,00
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	60.449.000,00	PAJAK DAERAH		32 Unit	150.000.000,00
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		1,85 %	6.712.491.325,00			1,85 %	8.505.000.000,00
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)		100 % 100 %	3.111.455.300,00			100%	4.005.000.000,00
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	230.476.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	650.000.000,00
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	2.880.978.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	3.355.000.000,00
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	3.601.036.025,00			100%	4.500.000.000,00

							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914602 Ha	13.990.486.478,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		914.602,3 Ha	13.800.000.000,00
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		15 Laporan	150.000.000,00
5	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahnya		2,75 %	385.839.000,00			2,75 %	1.000.000.000,00
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	385.839.000,00			100%	1.000.000.000,00
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian								
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	385.839.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		15 Laporan	1.000.000.000,00
6	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani		2,75 %	3.570.703.696,00			2,75 %	6.200.000.000,00
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)		100 % 100 %	3.570.703.696,00			100%	6.200.000.000,00
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.348.148.946,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Unit	1.350.000.000,00
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	2.122.142.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20 Unit	4.500.000.000,00
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani								
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	100.412.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Unit	350.000.000,00
	J U M L A H									42.116.030.137,00				48.385.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan program prioritas Rencana Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perkebunan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam Renja Tahun 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Musi Banyuasin, menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar sub sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. Program dan Kegiatan tahun 2025 dituangkan pada Tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DINAS PERKEBUNAN

No	Tujuan	Sasaran	IKK/IKU	Target 2025	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
											Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	8	6				7	8	9	10	11	12	13
									Dinas Perkebunan				45.061.252.511,00		
					3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				45.061.252.511,00		
					3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				5.061.252.511,00		
1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pertanian (Perkebunan)	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan pertanian (Perkebunan)	IKU	-	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	3.271.378.780,00		
				-	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	261.584.630,00		
				8 Dokumen	3	27	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	8 Dokumen	63.560.830,00	PAJAK DAERAH	
				2 Laporan	3	27	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	2 Laporan	19.017.000,00	PAJAK DAERAH	
				1 Data	3	27	01	2.01	0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	179.006.800,00	PAJAK DAERAH	
										Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	179.006.800,00	PAJAK DAERAH	
				100 %	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	10.082.375.949,00		
				75 Orang/bulan	3	27	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/bulan	10.082.375.949,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				100 %	3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	52.440.000,00		
				6 Dokumen	3	27	01	2.03	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	6 Dokumen	52.440.000,00	PAJAK DAERAH	
				100 % 100 %	3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 % 100 %	44.230.000,00		
				1 Paket	3	27	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0	PAJAK DAERAH	
				6 Orang	3	27	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	20.230.000,00	PAJAK DAERAH	
				-	3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	495.022.234,00		

				1 Paket	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	29.874.729,00	PAJAK DAERAH	
				2 Paket	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	47.912.831,00	PAJAK DAERAH	
				1 Paket	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Paket	50.166.561,00	PAJAK DAERAH	
				1 Paket	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	1 Paket	139.472.014,00	PAJAK DAERAH	
				2 Paket	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	59.246.499,00	PAJAK DAERAH	
				2 Paket	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	1 Paket	40.000.000,00	PAJAK DAERAH	
				12 Laporan	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	12 Laporan	2.891.000,00	PAJAK DAERAH	
				12 Laporan	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	121.480.000,00	PAJAK DAERAH	
				100 % 100 %	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 100 %	41.207.500,00		
				40 Unit	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	30 Unit	41.207.500,00	PAJAK DAERAH	
				100 % 100 %	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		100 % 100 %	1.518.449.667,00		
				12 Laporan	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	228.339.000,00	PAJAK DAERAH	
				12 Laporan	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.290.110.667,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				100 %	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	776.068.800,00		
				6 Unit	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	6 Unit	339.455.000,00	PAJAK DAERAH	
				5 Unit	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	383.354.800,00	PAJAK DAERAH	
				32 Unit	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	53.259.000,00	PAJAK DAERAH	

2	Meningkatkan Produktivitas Tanaman perkebunan	Meningkatnya dan Berkembangnya Infrastruktur Perkebunan serta Tersedianya Produksi	IKU	1,85 %	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		1,85 %	6.736.566.492,00		
				100 % 100 %	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)		100 % 100 %	3.954.947.750,00		
				12 Laporan	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	903.916.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				15 Laporan	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	3.051.031.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				100 % 100 %	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 100 %	3.601.036.025,00		
				1 Dokumen	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.854.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	2.776.763.842,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
3	Meningkatkan Produktivitas Tanaman perkebunan	Meningkatnya dan Berkembangnya Infrastruktur Perkebunan serta Tersedianya Produksi	IKU	1,85 % 1,85 %	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		1,85 % 1,85 %	7.640.278.291,00		
				100 % 100 %	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)		100 % 100 %	82.999.500,00		
				15 Laporan	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	82.999.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				-	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-		-	7.557.278.791,00		
				11 Unit	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11Unit	7.230.699.529,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	

				5 Unit	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	289.343.762,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	
4	Meningkatkan Produktivitas Tanaman perkebunan	Meningkatnya dan Berkembangnya Infrastruktur Perkebunan serta Tersedianya Produksi	IKU	1,85 %	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan		1,85 %	13.471.364.247,00		
				100 % 100 %	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota		100 % 100 %	13.471.364.247,00		
				50 Ha	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ha	98.347.649,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				914602 Ha	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914602 Ha	13.373.016.598,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				1 Laporan	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
5	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Meningkatnya Nilai NTP	IKU	2,75 %	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya		2,75 %	1.190.081.000,00		
				100 % 100 %	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 % 100 %	1.190.081.000,00		
				1 Laporan	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.190.081.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
6	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Meningkatnya Nilai NTP	IKU	2,75 %	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani		2,75 %	3.570.703.696,00		
				100 % 100 %	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)		100 % 100 %	2.751.583.701,00		
				30 Unit	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.017.108.201,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	
				30 Unit	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.666.450.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	

				5 Unit	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	68.025.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	
JUMLAH														45.061.252.511,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN						45.061.252.511,00							48.385.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						45.061.252.511,00							48.385.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						42.116.030.137,00							48.385.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.271.378.780,00						-	14.230.000.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	261.584.630,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK TANI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 % 100 %	540.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			8 Dokumen	63.560.830,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK TANI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			2 Laporan	19.017.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK TANI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			1 Data	179.006.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KELOMPOK TANI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Data	400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	10.082.375.949,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	7.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/bulan			75 Orang/bulan	10.082.375.949,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	60 Orang/bulan	7.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	52.440.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	6 Dokumen			6 Dokumen	52.440.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	6 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %			100 % 100 %	44.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket			0	0	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Paket	90.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang			6 Orang	20.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	5 Orang	170.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	50.166.561,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	139.472.014,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	2 Paket	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	59.246.499,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Paket	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket			2 Paket	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan			12 Laporan	2.891.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	121.480.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	12 Laporan	650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 % 100 %	41.207.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			40 Unit	41.207.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %			100 % 100 %	1.518.449.667,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	2.150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	228.339.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	12 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.290.110.667,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	12 Laporan	1.700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	776.068.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	100 %	1.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	6 Unit			6 Unit	339.455.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	6 Unit	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit			5 Unit	383.354.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	2 Unit	700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	32 Unit			32 Unit	53.259.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 6 : TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERKEBUNAN	32 Unit	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan</i>	1,85 %			1,85 %	6.736.566.492,00						1,85 %	8.505.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)	100 %			100 % 100 %	3.954.947.750,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	100 %	4.005.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan			12 Laporan	903.916.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	12 Laporan	650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan			15 Laporan	3.051.031.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	12 Laporan	3.355.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %			100 % 100 %	2.781.618.742,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	100 %	4.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	4.854.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>	3 Varietas Unggul Baru (VUB)			3 Varietas Unggul Baru (VUB)	2.776.763.842,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan</i>	2,1 % 2,1 %			1,85 % 1,85 %	7.640.278.291,00						2,1 % 2,1 %	4.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)</i>	100 %			100 % 100 %	82.999.500,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	100 %	400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	1 Laporan			15 Laporan	82.999.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	1 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	100 %			-	7.557.278.791,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	100 %	3.650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit			11 Unit	7.230.699.529,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	5 Unit	2.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			5 Unit	289.343.762,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	1 Unit	850.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,85 %			1,85 %	13.471.364.247,00						1,85 %	14.400.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota	100 %			100 % 100 %	13.471.364.247,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	100 %	14.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha			50 Ha	98.347.649,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	50 Ha	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	914.602,3 Ha			914602 Ha	13.373.016.598,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Kelompok Tani	914.602,3 Ha	13.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	15 Laporan			1 Laporan	1.190.081.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNTUK MENGAKSERELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI	Kelompok Tani	15 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani	2,75 %			2,75 %	2.751.583.701,00						2,75 %	6.200.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	100 %			100 % 100 %	2.751.583.701,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNTUK MENGAKSERELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI	Kelompok Tani	100 %	6.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit			30 Unit	1.017.108.201,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	6 Unit	1.350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit			30 Unit	1.666.450.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	20 Unit	4.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 Unit			5 Unit	68.025.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : MENINGK ATKAN PR ODUKTIVI TAS DAN HILIRISASI KOMODITA S UNGGUL AN UNTUK MENGAKS ELERASI P ERTUMBU HAN EKONOMI	Kelompok Tani	4 Unit	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	J U M L A H							45.061.252.511,00							48.435.000.000,00	



BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indicator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan criteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena banyaknya tanaman tua rusak, penggunaan bahan tanaman yang tidak bermutu dan bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanganan pascapanen yang belum memadai serta lemahnya kelembagaan petani.
2. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran seperti jalan produksi serta terbatasnya akses permodalan petani.
3. Rendahnya produksi tanaman perkebunan karena penggunaan bahan tanaman (benih) yang tidak bermutu / unggul dan gangguan hama penyakit
4. Mutu produk tanaman perkebunan yang masih rendah (belum memenuhi standar) dan harga produk tanaman perkebunan yang masih rendah pada tingkat petani.
5. Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan atau sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU.
6. Kurangnya jaminan kepastian usaha perkebunan karena masalah RTRW yang belum terselesaikan.
7. Terbatasnya persediaan benih unggul bersertifikat tanaman perkebunan pada sumber bibit.

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas perkebunan melalui upaya peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, rekomendasi pemupukan, memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan petani.
2. Membuka akses bagi pemasaran hasil produksi perkebunan dengan membangun jalan produksi
3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dengan menggunakan bahan tanaman (benih) unggul bersertifikat, penggunaan lahan yang optimal (jumlahtanaman per Ha), pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan saluran drainase serta mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan kebun serta gangguan bencana alam lainnya.
4. Meningkatkan mutu produk perkebunan dengan memberikan bimbingan teknis pengolahan, sosialisasi peraturan tentang mutu produk perkebunan dan pemberian bantuan alat pengolahan. Dengan meningkatnya mutu produk perkebunan maka diharapkan harga yang diterima petani pun meningkat sehingga menambah pendapatan petani.

Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

1. Melakukan register terhadap pedagang pengumpul / pembeli karet (Bahan Olahan Karet (Bokar) petani.
2. Peningkatan upaya penertiban perizinan perkebunan serta pembinaan dan monitoring pelaku usaha perkebunan
3. Percepatan penyelesaian Perubahan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin
4. Promosi untuk menarik minat investor membangun industry hilir perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin
5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan wawasan SDM perkebunan melalui pendidikan dan latihan, kursus kursus teknis fungsional, magang dan lain-lain secara terprogram dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perbankan dan dinas yang membidangi perkebunan di UPTD agar memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit permodalan pembangunan/peremajaan kebun program revitalisasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar dan acuan aparatur perkebunan untuk melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan sumber dana yang tersedia dari prioritas – prioritas dan pencapaian – pencapaian yang harus diwujudkan.

Akhirnya kami berharap apa yang telah kami rencanakan untuk pembangunan Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin ini dapat membantu meningkatkan produksi dan produktifitas hasil perkebunan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan petani dapat terwujud.

Sekayu, 25 Juli 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



AKHMAAD TOYIBIR, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19830820 200212 1 001